

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebelum Indonesia terbentuk, wilayah Indonesia terdiri dari kerajaan-kerajaan. Bahkan ketika terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, kerajaan-kerajaan tersebut memutuskan untuk bersatu menjadi bagian dari Indonesia. Wilayah negara Indonesia terpisah menjadi beberapa bagian yang terdiri dari beberapa pulau yang tersebar di sepanjang wilayah yang disebut Nusantara. Wilayah-wilayah tersebut telah memiliki sistem pemerintahan sendiri, dan sistem pemerintahan yang paling banyak diterapkan dan bertahan sampai sekarang adalah sistem *Monarchi* atau kerajaan.

Banyak raja-raja kecil yang tersebar di seluruh wilayah nusantara dan ada beberapa diantaranya yang merupakan kerajaan besar. Seperti kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Mataram, Kerajaan Samudra Pasai, Kerajaan Tarumanegara, Kerajaan Majapahit, Kerajaan Singosari, dan masih banyak kerajaan-kerajaan lain yang telah memiliki sistem pemerintahan sendiri. Diantara kerajaan-kerajaan tersebut, Kerajaan yang terbesar adalah Kerajaan Majapahit. Dimana dengan adanya sumpah dari Maha Patih Gajah Mada, seluruh wilayah nusantara dapat dipersatukan. Sumpah ini dikenal dengan sumpah *Pallapa*. Kerajaan Kutai merupakan kerajaan yang tertua di wilayah nusantara, sedangkan Kerajaan Mataram merupakan cikal bakal dari Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat atau Kraton Yogyakarta.

Beberapa kerajaan yang sampai sekarang masih berdiri dan sistem pemerintahannya masih tetap berjalan, diantaranya adalah Kraton Surakarta

Hadiningrat Surakarta, Kraton Kasepuhan Cirebon, Kraton Surosowan Banten, Kraton Kaibon Banten, Kraton Kanoman Cirebon, Kraton Kacirebonan Cirebon, Kraton Sumedang Larang, Pura Mangkunegaran Jawa tengah, Pura Paku Alaman Yogyakarta, Kraton Sumenep Jawa Timur, Kedaton Kutai Kartanegara Kalimantan Timur, Kraton Bumi Kencana/Bumi Selamat Kalimantan Selatan, Kraton Kesultanan Ternate Maluku Utara dan Kraton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat Yogyakarta.¹ Dari kerajaan tersebut, hanya Kraton Kasultanan Yogyakarta saja yang sistem pemerintahannya diakui oleh Negara Republik Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan kedudukan Sultan yang sekaligus merangkap sebagai Kepala Daerah Tingkat Satu atau setara dengan kedudukan Gubernur di Provinsi lain.

Setelah ditandatangani Perjanjian Giyanti pada zaman Belanda, Kraton Yogyakarta sudah dianggap berdiri. Perjanjian itu memecah Mataram menjadi dua wilayah pemerintahan, yaitu Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta. Sampai saat ini Kraton Kasultanan Yogyakarta mempunyai peranan yang tetap penting sebagai faktor penentu dalam dinamika kehidupan masyarakat Yogyakarta. Kraton Yogyakarta menjadi salah satu sistem simbol identitas masyarakat Jawa pada umumnya dan masyarakat Yogyakarta pada khususnya. Identitas ini merupakan sistem kultur yang meliputi: cara penghadiran diri atau representasi, penghayatan hidup, pemaknaan, nuansa kehidupan batin, dan cara pandang hidup.²

¹ <http://id.m.wikipedia.org/wiki/keraton> (diakses tanggal 20 Agustus 2014)

². Said Agil, 2001:1

Sejarah mencatat terjadinya Kasultanan Ngayogyakarta, disamping Kesunanan Surakarta, sambil tetap ingat akan kedua dimensi ulama (Sunan) dan umara (Sultan), atau dimensi vertikal dan horizontal. Dalam hubungan demikian itu Yogyakarta “merendah” dengan memilih nama Yogyakarta, *derivate* dari kata *Ayodyakarta*, seperti yang terdapat dalam kisah *Ramayana*. Dari situ didapatkan petunjuk bagaimana tugas utama, perjuangan kembali ke Mataram, membebaskan Shinta, dari genggaman Angkara Murka. Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat berdiri sejak 1755 didirikan oleh Pangeran Mangkubumi yang kemudian bergelar Sultan Hamengku Buwono I. Kadipaten Pakualaman, berdiri sejak 1813, didirikan oleh Pangeran Notokusumo, kemudian bergelar Adipati Paku Alam I.

Setelah Proklamasi Kemerdekaan RI, Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII mengirim pesan kepada Presiden RI, menyatakan bahwa Daerah Kasultanan Yogyakarta dan Daerah Pakualaman menjadi bagian wilayah Negara Republik Indonesia, serta bergabung menjadi satu mewujudkan satu kesatuan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pemerintah Hindia Belanda saat itu pun mengakui Kasultanan maupun Pakualaman, sebagai kerajaan dengan hak mengatur rumah tangga sendiri. Semua itu dinyatakan dalam kontrak politik. Terakhir kontrak politik Kasultanan tercantum dalam *Staatsblad* 1941 No 47 dan kontrak politik Pakualaman dalam *Staatblaad* 1941 Nomor 577.

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan wilayah tertua kedua di Indonesia setelah Jawa Timur, yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia.

Provinsi DIY ini juga memiliki status istimewa atau otonomi khusus. Status ini merupakan sebuah warisan dari zaman sebelum kemerdekaan. Kasultanan Yogyakarta dan juga Kadipaten Paku Alaman, sebagai cikal bakal atau asal usul DIY, memiliki status sebagai “Kerajaan vassal/Negara bagian/*Dependent State*” dalam pemerintahan penjajahan dari VOC, Hindia Perancis (Republik Bataav Belanda-Perancis), India Timur/EIC (Kerajaan Inggris), Hindia Belanda (Kerajaan Netherland), dan terakhir Tentara Angkatan Darat XVI Jepang (Kekaisaran Jepang). Oleh Belanda status tersebut sebagai *Zelfbesturende Landschappen* dan oleh Jepang disebut *Koti/kooti*. Status ini membawa konsekuensi hukum dan politik berupa kewenangan untuk mengatur dan mengurus wilayah (negaranya) sendiri di bawah pengawasan pemerintah penjajahan tentunya. Status ini pula yang kemudian juga diakui dan diberi payung hukum oleh Bapak Pendiri Bangsa Indonesia Soekarno yang duduk dalam BPUPKI dan PPKI sebagai sebuah daerah bukan lagi sebagai sebuah Negara.³

Secara formal predikat keistimewaan Yogyakarta dapat dilihat didalam maklumat 5 September 1945 yang dikeluarkan oleh Sultan Hamengku Buwono IX dan Paku Alam VIII yang intinya menyatakan bahwa Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman merupakan daerah istimewa dan menjadi bagian dari wilayah Republik Indonesia. Selanjutnya pengakuan terhadap keistimewaan tersebut dituangkan dalam konstitusi NKRI pada pasal 18b UUD Negara Republik Indonesia pada

³. Safrudin Bahar et. Al. (ed), 1993

1945 telah mengakui dan menghormati adanya satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa. Dengan demikian predikat Istimewa yang disandang Yogyakarta memiliki landasan hukum yang sangat kuat.⁴

Yogyakarta adalah kota budaya, pusat Kasultanan Islam beberapa abad yang lalu⁵. Hingga sekarang, tradisi budaya masih terus hidup, dan menjadi salah satu objek wisata yang mengharumkan nama Indonesia di mancanegara. Di kota ini, sangat kaya khasanah keislamannya, bukan saja terlihat dari karya budayanya, tetapi masih banyak karya-karya yang sangat berharga belum terungkap dan masih bisa digali.

Kota-kota kuno biasanya berpusat pada *keratin* sebagai tempat tinggal ratu atau penguasa. Tempat tinggal ratu merupakan kompleks bangunan, tempat bekerja para pendeta, pegawai administrasi, dan para seniman.⁶ Wilayah yang kemudian menjadi Kraton dan ibukota Yogyakarta telah lama dikenal sebelum Sultan Hamengku Buwono I memilih tempat itu sebagai pusat pemerintahan. Wilayah itu dikenal baik dari mulut kemulut (*leluri*), maupun dapat dilihat dalam sejarah tradisional (*babad*). Babad Giyanti mengisahkan, bahwa di wilayah itu terdapat *dalem* yang bernama Gerjiwanti yang didirikan oleh Sunan Amangkurat dan oleh Paku Buwono II dinamakan Ayogya.⁷

⁴ Sunanso, M. Si. Perbandingan Sistem Pemerintahan. Ombak. 2013 Yogyakarta hal 138

⁵ Said Agil, 2001:1

⁶ Surjomihardjo, 2000 Hal : 17

⁷ Ibid, Hal : 18

Melihat perkembangan sejarah dan pemerintahan Negara Republik Indonesia, Kraton Yogyakarta menjadi salah satu bagian yang tidak bisa dipisahkan dari perjalanan pemerintahan Negara Republik Indonesia, dari zaman awal kemerdekaan hingga sekarang ini. Bahkan, Kraton Yogyakarta telah menunjukkan eksistensinya sejak zaman sebelum kemerdekaan dan masa-masa awal kemerdekaan. Keberadaan Kraton Yogyakarta saat penting, mengingat begitu banyak peran Kraton Yogyakarta dalam proses berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keberadaan kerajaan di provinsi lain di Indonesia masih tetap dilestarikan. Mengingat keberadaan kerajaan merupakan salah satu peninggalan sejarah. Namun, berbeda dengan Kraton Yogyakarta yang tidak hanya keberadaannya saja yang dilestarikan, namun juga sistem pemerintahannya masih tetap berlaku di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Sultan tetap menjadi Raja sekaligus menjabat sebagai Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta.

Hak istimewa ini hanya berlaku di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dimana tidak akan ditemui di provinsi lain meskipun di provinsi tersebut masih terdapat kerajaan yang berdiri hingga sekarang. Hal ini penting untuk dibahas, karena disadari atau tidak dengan adanya perbedaan perlakuan dari pemerintah pusat tersebut dapat menyebabkan kecemburuan sosial di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Bagi masyarakat luar Yogya, mungkin ada kesan aneh atas kehidupan kenegaraan masyarakat Yogya. Sebab dalam dunia modern sekarang masyarakat Yogya masih mempertahankan raja

sebagai Gubernur/Kepala Daerah mereka. Mereka yang di dalam atau dari luar Yogya tidak dapat mengerti dan menghayati perasaan masyarakat Yogya, yang mau menerima dan mendukung Kepala Daerah yang bukan pilihan mereka, bahkan sebaliknya, Kepala Daerah yang berdasarkan hak asal-usul.⁸

Kraton Yogyakarta menjadi satu-satunya kerajaan yang masih tetap menunjukkan eksistensinya ditengah-tengah perpolitikan Indonesia saat ini. Keberhasilan Kraton Yogyakarta dalam mengatur masyarakatnya menunjukkan bahwa terdapat legitimasi yang kuat dari Sultan Hamengku Buwono IX dan Sultan Hamengku Buwono X sebagai seorang Raja yang dianut dan dijunjung tinggi *titahnya* oleh masyarakat Yogyakarta. Peranan Sultan dalam mengkonsolidasi kepentingan berbagai kalangan masyarakat telah membentuk suatu tatanan sistem pemerintahan yang kuat. Sehingga nilai-nilai yang telah dibuat oleh pendiri Kraton Yogyakarta masih tetap bertahan sampai saat ini.

Kita dapat melihat perkembangan sejarah Negara Indonesia. Dimana sejak berdirinya, Negara Indonesia telah mengalami tiga periode pemerintahan. Periode pemerintahan Orde Baru, Orde Lama, dan Reformasi. Dari ketiga pergantian pemerintahan tersebut, Kraton Yogyakarta tetap menunjukkan eksistensinya dan tidak terpengaruh secara signifikan dengan adanya perubahan sistem pemerintahan tersebut. Bahkan, eksistensi Kraton Yogyakarta tetap terjaga dari sejak zaman kolonial Belanda, zaman penjajahan Jepang, hingga Indonesia merdeka. Hal ini tentu tidak terlepas

⁸. Moedjanto : 1994 dalam Djoko Dwiyanto, Kraton Yogyakarta (Sejarah, Nasionalisma, & Teladan Perjuangan) Paradigma Indonesia. Yogyakarta: 2009

dari peran Sultan sebagai kepala pemerintahan serta masyarakat Yogyakarta yang tetap memegang teguh nilai-nilai yang telah berlaku.

Nilai-nilai yang masih dipegang kuat oleh masyarakat Yogyakarta menjadi salah satu faktor yang membuat Kraton Kasultanan Yogyakarta tetap eksis hingga saat ini. Budaya Politik *kawula gusti* sebenarnya dapat dikaji dari etika Jawa, yang terkenal tabah tetapi ulet. Mereka memang sudah sejak dulu terpatrit dalam *karma inggil* yang unik sebagai berikut :

1. Dalam kepasrahan menghadapi tantangan hidup yang keras, mereka berpedoman dan memberi istilah : “*Nrimo*”.
2. Dalam menghormati orang yang dituakan, lalu mengangkat seluruh jasa-jasanya untuk dicontoh, dan membenamkan dalam-dalam apa yang keliru diperbuat tokoh tersebut agar tidak lagi terulang, mereka memberinya istilah : “*Mikul Dhuwur Mendem Jero*”.
3. Dalam meniadakan kesombongan bila memperoleh keberuntungan, mereka memakai istilah : “*Ojo Dumeh*”.
4. Dalam memaantapkan pekerjaan agar teliti dan berhati-hati, walaupun kemudian memerlukan waktu, mereka beristilah: “*Alon-Alon Asal Kelakon*”.
5. Dalam meningkatkan kebersamaan dan kekeluargaan mereka beristilah : “*Mangan Ora Mangan Poko’e Kumpul*”.
6. Dalam merendahkan diri dan mengurangi kesewenang-wenangan bertindak, walaupun terhadap bawahan sekalipun mereka memberi istilah: “*Ngono Yo Ngono, Ning Ojo Ngono*”.

7. Dalam bertata karma walaupun terhadap pihak yang dikalahkan mereka memberi istilah : “*Ngluruk Tanpa Bolo, Digdaya Tanpa Aji-Aji, Menang Tanpa Ngasorake*”.⁹

Peranan Kraton Yogyakarta yang dalam hal ini tidak hanya sebagai pusat kekuasaan, namun juga sebagai institusi budaya yang keberadaannya harus tetap dijaga dan dilestarikan. Selain itu, keberadaan Kraton Yogyakarta dalam kancah perpolitikan Indonesia cukup diperhitungkan. Kehadiran Sultan dalam berbagai kegiatan politik dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Sultan sebagai kepala pemerintahan mempunyai pengaruh yang kuat tidak hanya dimasyarakat Yogyakarta saja, namun juga diseluruh wilayah Indonesia. Sebagai kepala pemerintahan, Sultan mampu menarik simpati banyak orang. Gaya kepemimpinan Sultan yang dipandang dekat dengan rakyat memberikan dampak positif bagi perkembangan Kraton Yogyakarta. Sehingga muncul anggapan bahwa Sultan adalah milik masyarakat Yogyakarta. Rasa memiliki inilah yang kemudian memunculkan pola hubungan timbal balik antara penguasa dan rakyatnya. Sehingga tercipta kehidupan yang harmonis, aman, dan teratur.

Keberadaan Kraton Yogyakarta telah banyak ikut andil dalam bidang perpolitikan Indonesia. Kraton Yogyakarta menjadi salah satu kekuatan politik yang tidak bisa tidak diperhitungkan dalam kancah perpolitikan nasional. Kita dapat melihat pada saat pemilu presiden dan wakil presiden 9 Juli lalu, nama Sultan Hamengku Buwono X sempat digadag-gadang akan

⁹ . Drs. Inu Kencana Syafii. Sistem Pemerintahan Indonesia. Rineka Cipta. 1994 Jakarta hal 130-131

diusung oleh salah satu partai untuk menjadi bakal calon presiden Republik Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh Sultan sangat kuat tidak hanya bagi masyarakat Yogyakarta saja, tetapi juga masyarakat Indonesia keseluruhan. Figur Sultan Hamengku Buwono X dianggap dapat menarik simpati masyarakat Indonesia. Sultan Hamengku Buwono X memiliki pengalaman, negarawan serta salah satu tokoh reformasi. Tentu, partai yang menginginkan Sultan menjadi kandidat calon presiden mempunyai alasan yang cukup kuat untuk mengajukan Sultan menjadi calon presiden dalam pemilu 9 Juli yang lalu.

Wacana menjadikan Sultan Hamengku Buwono X sebagai calon presiden pada pemilu yang lalu sempat menimbulkan beberapa tanggapan. Beberapa tanggapan positif terlontar dari anggota partai yang mewacanakan Sultan Hamengku Buwono X sebagai calon presiden. Wakil Sekretaris Jendral Partai Demokrat, Ramadhan Pohan mengatakan sambutan masyarakat terkait wacana Sultan Hamengku Buwono X menjadi Capres Demokrat ditanggapi masyarakat dengan positif. “Sultan menjadi capres Demokrat itu sangat positif tanggapannya. Terlihat di sosial media yang menyatakan setuju pencalonan Sultan,” kata Pohan usai diskusi ‘Menimbang Konvensi dan Arah Koalisi Partai Demokrat’ di Galeri Café TIM, Jakarta Pusat, Kamis (15/5/2014).¹⁰

Republik Indonesia merupakan sebuah peradaban yang masih sangat muda bila dibandingkan dengan Kraton Yogyakarta. Kraton Yogyakarta turut

¹⁰. Sumber <http://www.tribunnews.com/pemilu-2014/2014/05/15/wasekjen-demokrat-klaim-wacana-sri-sultan-capres-mendapat-samnutan-positif> (diakses tanggal 20 Agustus 2014)

membidani kelahiran peradaban baru. Ketika RI mengalami masalah-masalah kelahiran yang kritis, Kraton Yogyakarta menjadikan diri menjadi “ibu pengasuh” dengan segala pengorbanannya. Secara politis itu sangat jelas, ibukota RI dipindah ke Yogyakarta (sejak 1946). Kraton (Sultan Hamengku Buwono IX) mengatur strategi Serangan Umum 1 Maret 1949 untuk menunjukkan eksistensi RI di mata dunia dan sebagainya. Sejak awal, Kraton Yogyakarta telah memberikan banyak nutrisi bagi pertumbuhan peradaban Indonesia. Seperti induk semangnya, RI bagaikan bayi yang menyusu pada Kraton Yogyakarta. Banyak gagasan muncul dari Yogyakarta.

Selain sebagai Raja dan Kepala Daerah yang memegang peranan sentral dalam pengambilan kebijakan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, nama besar Sultan Hamengku Buwono X juga ikut andil dalam perpolitikan nasional. Telah terbukti beberapa waktu lalu Sultan Hamengku Buwono X diangkat menjadi kader dari beberapa partai politik. Dari partai besar seperti partai Golkar, hingga partai baru yaitu partai Nasdem. Partai tersebut mengajak Sultan Hamengku Buwono X sebagai kader mereka tentu tidak lepas dari betapa besar pengaruh Sultan Hamengku Buwono X dalam mempengaruhi simpati dari masyarakat Yogyakarta dan masyarakat Indonesia pada umumnya yang selalu menyanjung pemimpin mereka dan selalu *sendiko dawuh* atas apa yang pemimpin titahkan.

Semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi serta semakin banyak kebudayaan asing yang masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

ternyata tidak berpengaruh terhadap tradisi masyarakat Yogyakarta yang masih kental memegang teguh adat dan budaya Jawa. Setiap tahun masyarakat Yogyakarta tetap menjalankan tradisi mereka dengan rutin. Seperti acara *sekatenan*, *labuhan*, serta *jaman* yaitu ritual memandikan kendaraan seperti Kereta Kencana milik Kraton Kasultanan Yogyakarta. Nilai-nilai budaya yang tertanam kuat ditengah-tengah masyarakat ini tidak lepas dari peran serta keberadaan Kraton ditengah-tengah masyarakat Yogyakarta.

Bukti sejarah dan nama besar yang disandang oleh Kraton Yogyakarta sangat strategis. Hal ini dibarengi dengan julukan kota Yogyakarta sebagai Kota pelajar dan budaya. Tentu setiap tahunnya, kota Yogyakarta didatangi oleh ribuan calon pelajar yang akan menimba ilmu di perguruan tinggi yang ada di Yogyakarta. Selain didatangi oleh ribuan calon pelajar dari berbagai kota di Indonesia, setiap tahunnya terdapat ribuan pelajar yang pulang kekampung halamannya setelah menimba ilmu di Yogyakarta. Setelah mereka sampai di kampung halaman masing-masing, mereka pasti akan menceritakan pengalaman mereka selama menuntut ilmu di Yogyakarta. Dari sinilah kemudian tersebar berita bagaimana kehidupan masyarakat Yogyakarta yang sangat berbeda dengan masyarakat lainnya di Indonesia. Keramahan masyarakat Yogyakarta, kesantunan mereka, semua itu merupakan nilai-nilai yang telah ditanamkan oleh Kraton Yogyakarta yang tetap dipelihara oleh masyarakat sampai sekarang. Hal ini membuktikan betapa kuatnya *legitimasi* dari Kraton Yogyakarta sebagai pemegang

kekuasaan dalam membuat, menjaga, dan melaksanakan peraturan dan nilai-nilai dengan baik. Sehingga ketertiban, keamanan yang diharapkan dapat tercapai.

Tentunya hal ini menjadi keunikan tersendiri yang di miliki oleh Yogyakarta yang tidak di miliki oleh provinsi yang lain. Dengan semua uraian tersebut, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana pengaruh posisi Sultan Hamengku Buwono X sebagai gubernur terhadap eksistensi Kraton Yogyakarta dan apa saja yang menjadi kekuatan politik kraton dalam menjaga eksistensi di tengah perpolitikan Indonesia. Karena tanpa adanya pengaruh dan kekuasaan dalam eksistensi berpolitik, maka bukan hal yang mustahil jika Kraton Yogyakarta bisa berjaya sampai saat ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang tersebut, maka peneliti dapat merumuskan masalah yang ada yaitu:

1. *Bagaimana pengaruh posisi Sultan sebagai gubernur terhadap eksistensi Kraton Yogyakarta?*
2. *Apa kekuatan politik Kraton Kasultanan Yogyakarta dalam menjaga eksistensinya ditengah perpolitikan Indonesia?*

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah agar dapat mengetahui bagaimana pengaruh posisis kesultanan beliau sebagai

Gubernur terhadap eksistensi Kraton Yogyakarta serta penulis juga ingin mengetahui apa yang menjadi kekuatan politik Kraton Yogyakarta.

2. Manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini antara lain :

a. Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan dorongan bagi perkembangan teori tentang eksistensi Kraton Yogyakarta ditengah perpolitikan Indonesia

b. Praktis

Manfaat penelitian ini bagi pemerintah khususnya pihak Kraton Yogyakarta adalah sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah dan Kraton Yogyakarta dalam kaitannya menjaga eksistensi Kraton Yogyakarta ditengah perpolitikan Indonesia

D. Kerangka Teori

1. Kekuasaan

Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi perilaku seseorang atau kelompok lain, sesuai dengan keinginan para pelaku.¹¹

Konsep kekuasaan (*power*) erat sekali hubungannya dengan konsep kepemimpinan. Dengan memiliki kekuasaan, pemimpin memperoleh alat untuk memengaruhi perilaku para pengikutnya. Pemimpin seharusnya tidak hanya menilai perilakunya sendiri agar

¹¹Miriam Budiarto. *Dasar-dasar Ilmu politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010, hal. 17

mereka dapat mengerti bagaimana mereka memengaruhi orang lain, akan tetapi juga pemimpin harus mau dan mampu menilai posisi mereka dan cara menggunakan kekuasaan.¹²

Definisi kekuasaan menurut seorang ahli kontemporer Barbara Goodwin (2003):

Kekuasaan adalah kemampuan untuk mengakibatkan seseorang bertindak dengan cara yang oleh yang bersangkutan tidak akan dipilih, seandainya ia tidak dilibatkan. Dengan kata lain memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendaknya.¹³

Bentuk-bentuk kekuasaan dapat kita bagi menjadi beberapa pengertian:

- 1) *Influence* (pengaruh), kemampuan untuk memengaruhi orang lain agar mengubah sikap dan perilakunya secara sukarela;
- 2) *Persuasion* (persuasi), kemampuan meyakinkan orang lain dengan argumentasi untuk melakukan sesuatu;
- 3) *Manipulation* (manipulasi), penggunaan pengaruh. Dalam hal ini, yang dipengaruhi tidak menyadari tingkah lakunya mematuhi pemegang kekuasaan;
- 4) *Coerce* (paksaan), peragaan kekuasaan (ancaman paksaan) yang dilakukan seseorang atau kelompok terhadap pihak lain agar bersikap dan berperilaku sesuai dengan kehendak pemilik kekuasaan; dan

¹²Veithzal Rivai, M.B.A. dan Prof. Dr. Deddy Mulyadi, M.Si. Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi. RAJAGRAVINDO PERSADA. Jakarta 2011 hal 341-342

¹³ Barbara Goodwin, *Using Political Ideas*, ed. ke-4 (West Sussex, England:Barbara Goodwin,2003), hlm. 307

- 5) *Force* (menekan), penggunaan tekanan fisik, membatasi kebebasan menimbulkan rasa sakit, ataupun membatasi pemenuhan kebutuhan biologis agar melakukan sesuatu.

Sedangkan, sumber kekuasaan yang dimiliki seseorang bermacam-macam. Secara umum, kekuasaan berdasarkan sumbernya terdiri dari beberapa hal:

- 1) *Legitimasi Power*: perolehan kekuasaan melalui pengangkatan (UU, SK, dan lain-lain);
- 2) *Coercive Power*: perolehan kekuasaan melalui cara kekerasan (perebutan atau perampasan bersenjata, *unconstitutional*, kudeta [*coup d'etat*]);
- 3) *Expert Power*: perolehan kekuasaan berdasarkan keahlian seseorang (*merit system*);
- 4) *Reward Power*: perolehan kekuasaan melalui suatu pemberian atau karena berbagai pemberian; dan
- 5) *Referent Power*: perolehan kekuasaan melalui daya tarik seseorang (fisik, *performance*, dan lain-lain).¹⁴

2. Elite Politik

Prinsip-prinsip umum yang dijadikan pedoman dalam mengkaji konsep-konsep elit itu telah dikemukakan oleh Pareto, Mosca, Michels.

Prinsip-prinsipnya yang utama dapatlah dikemukakan sebagai berikut:¹⁵

¹⁴ Abu Bakar Ebyhara. Pengantar Ilmu Politik. AR-RUZZ MEDIA. Yogyakarta: 2013. Hal.179-180

¹⁵ Sudijono Sastroatmodjo. Putman dalam Mochtar Mas'oeed, op. cit, hal 72-73 (Perilaku Politik. IKIP Semarang Press. Semarang 1995 hal 144-145

- (1) Kekuasaan Politik, seperti juga barang-barang sosial lainnya didistribusikan dengan tidak merata. Gagasan Pareto tentang pemeringkatan orang berdasarkan pemilikan akan barang, yang berwujudkan kekayaan, kecakapan, atau kekuasaan politik merupakan hal yang menunjukkan prinsip itu.
- (2) Hakikatnya orang hanya dikelompokkan dalam dua kelompok, yaitu mereka yang memiliki kekuasaan politik “penting” dan mereka yang tidak memilikinya. Kaum elit klasik umumnya berpendapat bahwa distribusi kekuasaan hampir dalam segala hal dapat dipandang dalam arti dikotomis itu.
- (3) Secara internal, elit itu bersifat homogeny, bersatu, dan memiliki kesadaran kelompok. Elit itu tidak merupakan suatu kumpulan individu yang saling terpisah-pisah, atau sekedar merupakan penjumlahan orang-orang saja. Tetapi sebaliknya, seperti juga anggota-anggota klub khusus dan terbatas individu-individu yang berada dalam elit itu saling mengenal dengan baik, memiliki latar belakang yang mirip, dan (walaupun memiliki pandangan yang berbeda) memiliki nilai-nilai, kesetiaan, dan kepentingan yang sama. Artinya ada yang mengatakan bahwa kelompok elit itu memiliki kesadaran, keutuhan, dan kebulatan tujuan kelompok.
- (4) Elit itu mengatur sendiri kelangsungan hidupnya (*self perpetuating*) dan anggotanya berasal dari suatu lapisan masyarakat yang sangat

terbatas. Pemimpin-pemimpin selalu memilih sendiri penggantinya dari kalangan istimewa yang hanya terdiri dari beberapa orang.

- (5) Kelompok elit itu hakikatnya bersifat otonom, kebal akan gugatan dari siapa pun di luar kelompoknya mengenai keputusan-keputusan yang dibuatnya. Semua persoalan politik penting diselesaikan menurut kepentingan atau tindakan kelompok ini.

Teori elit mengandung bahwa setiap masyarakat terbagi dalam dua kategori yang luas yang mencakup:

- (a) sekelompok kecil manusia yang berkemampuan dan karenanya menduduki posisi untuk memerintah; dan
- (b) sejumlah besar massa yang ditakdirkan untuk diperintah.

Pareto membagi stratifikasi masyarakat dalam dua kategori yaitu elit yang memerintah (*governing elit*) dan elit yang tidak memerintah (*non-governing elite*).¹⁶

3. Politik

Teori politik berasal dari dua suku kata, teori dan politik. Teori dapat diartikan sebagai cara, model kerangka pikiran ataupun pendapat yang dikemukakan oleh seseorang sebagai keterangan mengenai suatu peristiwa. Sedangkan politik berarti negara (berasal dari kata polis).¹⁷

Politik juga memiliki arti sebagai proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Pengertian ini

¹⁶ S. P. Varma, *Teori Politik Modern*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1987) hal 197

¹⁷ *Ibid*

merupakan upaya penggabungan antara berbagai definisi yang berbeda mengenai hakekat politik yang dikenal dalam ilmu politik.

Montesquieu terkenal dengan dunia ilmu pengetahuan tentang negara, hukum dan kemudian mengemukakan *state of nature* yang diartikan dalam keadaan alamiah kualitas hidup manusia rendah. Teori *Trias Politika* yang dikemukakan oleh Montesquieu merupakan landasan pembangunan teori demokrasi dalam sistem politik yang menekankan adanya *Check And Balance* terhadap mekanisme pembagian kekuasaan. Demokrasi yang dibentuk yaitu demokrasi liberal yang masih mengalami kekurangan. Untuk memantapkan dan menyempurnakan teori demokrasi liberal maka dibutuhkan berbagai unsur-unsur demokrasi liberal untuk mengukuhkan Montesquieu sebagai pencetus demokrasi liberal.

Teori politik hukum yang dominan mengutarakan kegiatan-kegiatan penguasaan yang harus berdasarkan hukum yang disebut *Rule of Law*. Perkembangan teori kekuasaan hukum menurut Thomas Aquinas, John Locke, Krabe, dan Krenen Berg.

Kebaikan-kebaikan teori kekuasaan hukum meliputi: penguasa menjalankan kekuasaan hukum, penguasa berkuasa sesuai hukum, penguasa berupaya menerapkan open manajemen, pers yang bebas sesuai dengan UUD Negara, adanya kepastian hukum dalam sistem demokrasi, pemilu yang bebas dan rahasia, setiap warga negara diikutkan dalam mekanisme politik, setiap warga negara sama di depan hukum dan

diperlakukan pengawasan masyarakat. Kelemahan-kelemahan dari teori kekuasaan hukum apabila penguasa sudah menggunakan kekuasaan semena-mena maka pada saat itu teori kekuasaan hukum menjadi lunak.

E. Definisi Konsepsional

Masri Singarimbun mendefinisikan Definisi Konsepsional adalah sebagai berikut: “konsep adalah abstraksi mengenai suatu fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari sejumlah karakteristik kejadian, keadaan kelompok atau individu.”¹⁸ Selanjutnya definisi konsepsional dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kekuasaan

Kekuasaan merupakan suatu cara yang dimiliki dan dilakukan seseorang untuk mempengaruhi orang lain untuk melakukan apa yang dikehendakinya.

2. Elit

Elit merupakan seseorang yang menduduki jabatan-jabatan politik (kekuasaan) di eksekutif dan legislatif yang dipilih melalui pemilihan umum dan dipilih dalam proses politik yang demokratis ditingkat lokal.

Elit sering di artikan sebagai sekumpulan orang sebagai individu-individu yang superior, yang berbeda dengan massa yang menguasai jaringan-jaringan kekuasaan atau kelompok yang berbeda dilingkaran kekuasaan maupun yang sedang berkuasa.

3. Politik

¹⁸ Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Jakarta, 2011 hal 17

Politik merupakan cara yang dilakukan untuk memisahkan dan mengatur kepentingan negara. Didalam politik terdapat mekanisme untuk mengatur proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat.

F. Definisi Operasional

Definisi operasional menurut Masri Singarimbun dan Sofian Effendi adalah sebagai berikut:

“Definisi operasional adalah unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana caranya mengukur suatu variabel. Dengan kata lain, definisi operasional adalah semacam petunjuk pelaksanaan bagaimana cara mengukur suatu variabel. Informasi inilah yang amat membantu peneliti lain yang ingin menggunakan variabel yang sama.”¹⁹

Dari uraian di atas, maka penulis dalam penelitian ini akan menganalisis eksistensi Keraton Kasultanan Yogyakarta ditengah Perpolitikan Indonesia dengan menggunakan indikator-indikator sebagai berikut:

1. Sikap politik Sri Sultan Hamengku Buwono X, meliputi:
 - a. Sri Sultan Hamengku Buwono X sebagai Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta
 - b. Sri Sultan Hamengku Buwono X sebagai Sultan/raja Kraton Kasultanan Yogyakarta
2. Kedudukan Kraton Kasultanan Yogyakarta, meliputi:
 - a. Kraton Kasultanan Yogyakarta sebagai pusat kekuasaan

¹⁹ Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Jakarta, 1989 hal 46

- b. Kraton Kasultanan Yogyakarta sebagai institusi budaya
3. Posisi Kraton Kasultanan Yogyakarta, meliputi:
 - a. Sebelum diberlakukannya Undang-undang Keistimewaan
 - b. Setelah diberlakukannya Undang-undang Keistimewaan
 4. Peta kekuatan Kraton Kasultanan Yogyakarta
 5. Faktor-faktor yang menjadi pendukung dan kendala dalam pelaksanaan pemerintahan, meliputi:
 - a. Pra penetapan
 - b. Pasca penetapan

G. Metode Penelitian

Metode adalah suatu cara yang digunakan dalam mencapai sebuah tujuan dan membuat sebuah analisa dengan baik dan memperoleh hasil yang dapat dipertanggung jawabkan maka penelitian ini memerlukan metode tertentu. Untuk meneliti permasalahan di atas maka penyusunan menggunakan metode sebagai berikut ²⁰:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati dan dianalisis serta digunakan untuk meneliti pada objek yang diteliti, yang mana data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata dan angka-angka. Berdasarkan pengertian diatas,

²⁰. Alvin Noor Sahab Rizal , Skripsi Sabda Raja Sultan Hamengku Buwono X tentang suksesi kekuasaan dalam keraton ngayogyakartaohidiningrat, 2016, Hal : 15

penelitian ini ingin mengetahui bagaimana pengaruh posisi sultan sebagai gubernur terhadap eksistensi Kraton Yogyakarta serta ingin mengetahui apa yang menjadi kekuatan politik Kraton Kasultanan Yogyakarta dalam menjaga eksistensi di tengah perpolitikan Indonesia.

2. Unit Analisis

Dalam penelitian ini unit analisisnya terdiri dari Kraton Kasultanan Yogyakarta, Kadipaten Pakualaman, Majalah, Skripsi, Tesis, Website. Dari masing-masing unit analisis inilah data akan digali dan selanjutnya dilakukan penelaahan.

3. Jenis Data

Pengumpulan data merupakan proses yang sangat dibutuhkan sehubungan dengan referensi yang digunakan dalam mengumpulkan data-data dan literature yang relevan dan permasalahan yang menjadi sasaran penelitian. Dalam penelitian ini dilakukan melalui langkah langkah sebagai berikut :

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber aslinya atau data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perorangan.²¹ Data primer dalam penelitian ini adalah jawaban informan melalui wawancara.

Untuk melakukan wawancara ini adapun yang kami wawancarai untuk mendapatkan informasi dari hasil wawancara yaitu:

²¹.Umar husein, *Riset Pemasaran dan Prilaku*. Jakarta : Gramedia, 2010 hal 130.

- Bapak KRT. H. Jatiningrat. SH beliau adalah Pengageng Tepas Dwarapura Karaton Ngayogyakarta
- Abdi nDalem Tepas Dwarapura Karaton Ngayogyakarta
- Vedy Santoso,S.Kom.I, M.Sn. beliau adalah Peneliti Culture Studies pascasarjana ISI Yogyakarta

Tujuan melakukan wawancara terhadap mereka untuk mendapatkan informasi bagaimana pengaruh posisi Sultan sebagai Gubernur terhadap eksistensi Kraton Yogyakarta serta dapat mengetahui apa yang menjadi kekuatan politik keratin kesultanan Yogyakarta dalam menjaga eksistensinya ditengah perpolitikan Indonesia.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi literatur berupa referensi-referensi yang relevan dengan topik yang dibahas dan yang disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer maupun oleh pihak lain.²² Sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data (peneliti) atau daftar yang diambil peneliti sebagai pendukung atas penelitian dari sumber-sumber yang dapat dipercaya dan dipertanggung jawabkan secara ilmiah, yaitu dengan melakukan studi pustaka (penelusuran melalui buku, artikel, jurnal, internet, dan dari sumber lainnya).

²².Ibid hal:130

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Maka dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yang lazim digunakan dalam penelitian ilmiah yang meliputi teknik wawancara atau interview dan dokumentasi.

a. Wawancara/interview

Wawancara/interview adalah berkomunikasi langsung dengan mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan tertentu kepada responden guna mengetahui berbagai informasi yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti dan agar data yang diperoleh benar-benar lengkap dan dapat dipercaya.

- 1) Wawancara untuk mendapatkan keterangan-keterangan dan data-data dari KRT. H. Jatiningrat. SH beliau adalah Pengageng Tepas Dwarapura Karaton Ngayogyakarta dan Abdi nDalem Tepas Dwarapura Karaton Ngayogyakarta untuk keperluan informasi.
- 2) Wawancara untuk mendapatkan keterangan tentang Sultan Hamengku Buwono X dan Kraton Yogyakarta.

Teknik wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan keterangan-keterangan lebih lanjut berkaitan dengan daftar pertanyaan yang diajukan. Responden dalam metode wawancara ini adalah masyarakat yang berada di wilayah Kraton Kasultanan Yogyakarta.

b. Dokumentasi

Suatu pengumpulan data dengan memanfaatkan data sekunder yang sudah tersedia di perpustakaan yang mempunyai relevansi dengan obyek penelitian. Teknik dokumenter digunakan untuk mendapatkan data sekunder yaitu dengan menggunakan data yang diperoleh dari catatan-catatan, buku-buku, arsip-arsip, dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini dan diharapkan dapat menjadi pelengkap dalam menganalisis permasalahan dalam penelitian ini.

Sulistyo Basuki menyatakan dokumentasi merupakan kegiatan yang bersangkutan paut dengan dokumen tertentu. Dokumen adalah wahana seperti buku-buku, majalah, pamflet, foto-foto, rekaman suara sebagai rekaman dari komunikasi langsung.²³

c. Observasi

Sutrisno Hadi memberikan pengertian observasi sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis atas fenomena-fenomena yang diselidiki. Pengamatan langsung dimaksudkan untuk “menarik” diri saya sebagai pengamat partisipan ke “dalam” kancah dan suasana dari fenomena yang diselidiki. Hal ini dimaksudkan untuk memahami proses historis, motif-motif, ide-ide, wacana yang berkembang, serta pergumulan relasi kuasa yang terjadi.

²³ Sulistyo Basuki, *Teknik dan Jasa Dokumentasi*, Garamedia, Jakarta, 1992, hal 2

5. Teknik Analisis Data

Setelah proses pengumpulan data selesai, proses selanjutnya adalah menganalisis data. Analisis data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.²⁴ Seluruh data yang telah dikumpulkan, baik berupa hasil observasi, wawancara, dokumentasi, studi pustaka dan sebagainya. Untuk kemudian peneliti membaca, pahami, dipelajari, dan ditelaah untuk kemudian mengadakan reduksi data yang dilakukan dengan jalan membuat abstraksi. Peneliti menggunakan langkah-langkah analisis sebagai berikut:

a. Pengumpulan data

Data penelitian yang diperoleh dengan menggunakan beberapa teknik yang sesuai dengan model interaktif, seperti wawancara mendalam dan dokumentasi yang diperoleh dari penelitian.

b. Reduksi data

Reduksi data yaitu proses pemilihan dan pemusatan pada data yang relevan dengan permasalahan penelitian, yaitu dengan penyeleksian data-data yang berhubungan erat dengan penelitian agar fokus dan terarah yang disesuaikan dengan topik penelitian.

c. Penyajian data

Menggambarkan fenomena atau keadaan sesuai dengan data yang telah direduksi, yaitu bagaimana cara memaparkan peristiwa tersebut

²⁴ Singarimbun, 1995:189-263.

yang disesuaikan dengan kerangka teori yang ada, serta dikombinasikan berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan.

d. Kesimpulan

Yaitu permasalahan penelitian yang menjadi pokok pemikiran terhadap apa yang diteliti dengan memaparkan pokok permasalahan yang terjadi dan yang telah diteliti.